

PEMBELAJARAN TERPADU (*INTEGRATED CURRICULUM*) PENDIDIKAN MORAL DALAM MATA PELAJARAN

Oleh: L. Hendrowibowo¹

Abstrak

Penyimpangan moral di kalangan anak sekolah (khususnya SLTP), menjadikan tugas guru dan perancang pendidikan moral amatlah sulit. Penanaman nilai-nilai untuk menangkal perbuatan amoral dapat dilaksanakan dalam sistem pembelajaran terpadu dalam suatu mata pelajaran. Ada empat model penyampaian pembelajaran moral, yakni (1) model sebagai mata pelajaran tersendiri, (2) model terintegrasi dalam mata pelajaran, (3) model di luar pengajaran, dan (4) model gabungan.

*Model pembelajaran terpadu (*integrated curriculum*) dirasa paling tepat karena tidak memerlukan bidang/mata pelajaran tersendiri. Mata pelajaran yang paling cocok adalah mata pelajaran yang terkait dengan interaksi sosial murid, yakni pendidikan agama, pendidikan Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, dan pendidikan bahasa Indonesia. Keberhasilan pendidikan moral akan terlihat jika siswa melakoni perbuatan yang bermoral.*

Kata kunci: pembelajaran terpadu, pendidikan moral.

Pendahuluan

Dekadensi moral di kalangan anak SLTP sudah lama menjadi keprihatinan kita semua, utamanya masyarakat yang mengelola dunia pendidikan. Penyimpangan moral tersebut menjadikan tugas para guru dan perancang pendidikan moral amatlah sulit. Upaya untuk menanggulangi permasalahan tersebut sudah banyak dilakukan. Seminar tentang hal tersebut bermunculan dilaksanakan, forum diskusi baik di televisi maupun media lain yang melibatkan guru, pemuka agama, aparat hukum dan tokoh terkait lainnya sudah sering dilakukan, namun masalah yang diprihatinkan tersebut masih berlanjut.

Bukti-bukti yang terpantau di media masa cetak maupun elektronik, di antaranya sebagai berikut.

Perkelahian antar siswa sekolah di Jakarta dan kota besar lainnya. Keagresifan anak SLTP, sudah kelewat batas norma-norma susila Penggunaan narkoba sudah merambah pada siswa SLTP. Peredaran obat-obat terlarang,

¹ Dosen pada Jurusan FSP Fakultas Ilmu Pendidikan UNY Yogyakarta

peredaran CD dan gambar-gambar porno sudah sampai pada siswa SLTP, terutama di kota-kota besar.

Antar keluarga dekat saling menyiksa bahkan hingga membunuh karena merebutkan warisan/peninggalan orang tua. Guru menghukum anak, hanya karena tidak memakai seragam. Siswa SLTP membawa sajam ke sekolah.

Seperti kejadian belum lama di Yogyakarta, siswa membunuh siswa lain yang berbeda sekolah dengan panah beracun, SLTP sekitar Jl. Daan Mogot Jakarta berkelahi dan salah satunya membunuh dengan senjata clurit. Jika dirunut terus hal-hal seperti ini akan terus berlanjut, untuk itu harus ada pencegahan, salah satunya lewat pendidikan moral. Dengan kata lain pendidikan moral menjadi salah satu faktor yang turut mempengaruhi terjadi tidaknya penyimpangan-penyimpangan moral di kalangan remaja pada umumnya dan secara khusus pada siswa SLTP.

Kebiasaan bangsa Indonesia yang cenderung membiarkan dirinya melakukan perbuatan amoral telah menyebabkan krisis bangsa ini semakin berlarut-larut. Oleh karena itu, perlu suatu kesadaran bahwa masalah moral sepadan dengan perang (*moral equivalen of war*). Dampaknya, rakyat akan mulai meningkatkan moralnya daro dalam diri sendiri dan sebaiknya diawali sedini mungkin. Untuk itulah sekolah tidak boleh ketinggalan dalam hal pembelajaran moral tersebut. Nurcholis Madjid, Rektor Universitas Paramadina mengatakan "Gerakan penguatan moral nilainya sama besar dengan peperangan. Maksudnya, sama-sama memiliki tujuan dan sama-sama membutuhkan dukungan yang kuat dari seluruh rakyat".

Hasil wawancara dengan dr. Suwadi pengelola Klinik Konsultasi Remaja dan Keluarga, serta hasil penelitian Haryanto (1996) menunjukkan bahwa tingkat pemakaian narkoba di kalangan remaja Yogyakarta sudah membahayakan, penyimpangan-penyimpangan moral lainnya juga semakin meningkat.

Kejujuran sebagai salah satu indikator moral juga tidak berkembang dengan subur. Ketidakjujuran menjamur dalam kehidupan, termasuk di dalam kelas, contoh siswa mencontek. Kejujuran yang merupakan "modal" di segala bidang bahkan dalam ekonomi global, di sekolah tidak terlalu mendapat porsi perhatian yang memadai.

Saat ini tindakan amoral terjadi dimana-mana, Paul Suparno (Kompas, 11 Maret 2003), mengatakan di sekolah guru dan dosen korupsi waktu dalam mengajar, beberapa di antaranya main katrol nilai siswa/mahasiswa, siswa dan mahasiswa "nyontek", penjiplakan (plagiat) oleh mahasiswa dalam menulis

skripsi, tesis bahkan disertasi, korupsi uang bagi pejabat pendidikan, ini semua menunjukkan tindakan manusia yang “amoral”. Perbuatan amoral tidak akan terjadi, jika sistem, situasi dan kondisi, serta kesempatan tidak memungkinkan.

Lebih lanjut Paul Suparno mengatakan bahwa mereka yang punya moralitas rendah, tidak berpikir tentang kehidupan orang lain, menunjukkan bahwa ia ikut menghancurkan kehidupan masyarakat yang luas, di mana dirinya sendiri ada dalam kelompok tersebut. Orang hanya berpikir untuk dirinya dan kelompoknya. Hal tersebut dapat dikurangi melalui pendidikan moral di sekolah secara bertahap.

Pesan nasional yang tercantum dalam tujuan pendidikan nasional baik yang ada dalam UU. No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional maupun GBHN, jelas menyebut pembentukan manusia yang bermoral.

Perbuatan yang bermoral berarti perbuatan tersebut sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan atau ketentuan-ketentuan yang berlaku dan terjadi dalam masyarakat. Pelanggaran terhadap kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dapat merupakan perbuatan yang tidak bermoral.

Sesungguhnya moral itu bukan hanya merupakan suatu tindakan yang sesuai dengan ukuran (nilai-nilai) yang berlaku dalam masyarakat, melainkan juga merupakan suatu ukuran yang muncul dari kata hati manusia untuk mengakui bahwa suatu tindakan dianggap benar sekaligus baik. Setiap nilai-nilai yang diakui oleh masyarakat, menjadi pedoman tingkah laku bagi setiap anggota masyarakat dan diakui sebagai nilai-nilai pribadi anggota masyarakat tersebut. Dengan demikian setiap tindakan atau perbuatan harus dilakukan dengan rasa tanggung jawab untuk terciptanya kesejahteraan bersama, untuk kepentingan orang banyak dan bukan semata-mata untuk kebahagiaan atau kepentingan pribadi mereka masing-masing.

Blasi (1980) mengemukakan bahwa perilaku moral akan begitu sempit jika dibatasi pada perilaku moral yang dilihat saja. Perilaku moral meliputi hal-hal yang dapat dilihat dalam bentuk tindakan moral dan hal-hal yang tidak dapat dilihat. Penalaran moral untuk membuat suatu keputusan dalam melakukan tindakan moral adalah perilaku moral yang tidak dapat dilihat, tetapi dapat ditelusuri dan dapat diukur.

Penalaran moral merupakan faktor penentu yang melahirkan perilaku moral (Kohlberg, 1977). Oleh karena itu, untuk menemukan perilaku moral yang sebenarnya dapat ditelusuri melalui penalarannya. Artinya, pengukuran moral yang benar tidak sekedar mengamati perilaku moral yang nampak, tetapi melihat

penalaran moral yang mendasari keputusan perilaku moral tersebut. Dengan mengukur tingkat penalaran moral akan dapat mengetahui tinggi rendahnya moral tersebut.

Sejak kematian Sokrates dengan minum racun menjelang abad kelima sebelum Masehi, mulai membuka pemikiran manusia tentang aspek-aspek yang berkaitan dengan moralitas. Bertopang pada keyakinan tersebut Sokrates berkeputusan untuk menjalankan kebenaran obyektif, dengan melaksanakan keputusan pengadilan Athena, walaupun disisi lain – murid-murid Sokrates menginginkan Sokrates untuk melarikan diri dengan jalan beberapa murid akan menyuap “sipir” penjara untuk melepaskan Sokrates. Peristiwa tersebut merupakan suatu langkah ke arah transformasi radikal mengenai landasan pokok tentang moralitas dalam filsafat Yunani. . Persoalan apakah kebaikan itu sesuatu yang nyata (real) dan tidak berubah ataukah ia tergantung dari konteksnya (historis, kultural, situasi dan kondisi, ataupun individual), masih menjadi perbincangan hingga saat ini.

Plato murid Sokrates mengatakan bahwa kebenaran yang obyektif itu ada. Untuk meraih kebenaran menurut Plato melalui penalaran. Salah satu karya Plato yang berkaitan dengan moralitas, berjudul “Republik”. Lebih lanjut Plato mengatakan bahwa, individu akan bermoral baik manakala unsur kejiwaan (yaitu nafsu, semangat dan akal budi) terorganisasi secara terpadu dan selaras. Akal budi mengatur secara adil dan benar sesuai dengan “semangat” serta kebutuhan “nafsu”. Suatu hidup yang baik (bermoral) itu memperlihatkan kepedulian terhadap seprangkat kebijakan, termasuk di dalamnya kebijakan dalam perangai, keberanian dan lebih-lebih lagi “kebijaksanaan”. Tokoh filsuf berikutnya selalu mengaitkan hidup ini dengan kebaikan, yang tentunya mereka mempunyai cara dan versi tersendiri tentang kebaikan tersebut, sehingga satu dengan lain ada perbedaan mungkin juga ada kesamaannya.

Pengertian Moral

Secara etimologis kata *moral*, berasal dari kata Latin *mores*, yang berarti adat istiadat, kebiasaan atau cara hidup. Dalam arti demikian, moral mempunyai arti yang sama dengan kata *etika* yang diturunkan dari kata Yunani *ethos*, yaitu suatu kebiasaan, adat istiadat. “Etika mempelajari kebiasaan manusia yang sebagian terdiri dari konvensi-konvensi seperti: cara berpakaian, tata cara, tata krama, *etiquette*, dan semacam itu” (W. Poespoprojo, 1986). Dengan demikian, moral dan

ethos memiliki arti yang sama yakni suatu kebiasaan yang harus diikuti atau dipatuhi.

Namun demikian antara moral dan etika dapat dibedakan, moral menekankan pada perbuatan atau tingkah laku manusia (*moral act*), sedangkan etika menekankan kepada tata cara atau ketentuan yang harus diikuti atau dipedomani dalam melakukan suatu perbuatan atau tindakan (*ethical code*). “Dewasa ini, orang condong untuk memakai *morality* atau moral untuk menunjukkan tingkah laku itu sendiri, sedangkan *ethics* atau etika menunjukkan kepada penyelidikan tentang tingkah laku” (Kadarusmadi, 1987).

Magnis Suseno (1987) mengatakan bahwa kata moral selalu mengacu pada baik-buruknya manusia, sehingga bidang moral adalah bidang kehidupan manusia dilihat dari segi kebajikannya sebagai manusia. Norma-norma moral adalah tolok ukur yang dipakai masyarakat untuk mengukur kebaikan seseorang. Menurut Magnis Suseno, sikap moral yang sebenarnya disebut moralitas. Ia mengartikan moralitas sebagai sikap hati orang yang terungkap dalam tindakan lahiriah. Moralitas terjadi apabila seseorang mengambil sikap yang baik, karena ia sadar akan kewajiban dan tanggung jawabnya dan bukan karena ia mencari keuntungan. Jadi moralitas adalah sikap dan perbuatan baik yang betul-betul tanpa pamrih. Baron, dkk. (1980) mengatakan moral adalah hal-hal yang berhubungan dengan larangan dan tindakan yang membicarakan salah atau benar.

Perkembangan Moral

Berbagai penelitian telah dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan tingkat penalaran moral. Piaget, Lee (dalam Sjarkawi, 1995) menyatakan bahwa perkembangan tingkat penalaran moral dipengaruhi oleh 2 faktor, yakni faktor internal dan eksternal. Faktor internal dipengaruhi oleh tingkat perkembangan intelektual, sedangkan faktor eksternal dapat berupa pengaruh dari keluarga, dan kelompok sebaya. C. Asri Budiningsih (1984) dalam hasil penelitiannya mengatakan bahwa salah satu faktor penting perkembangan moral adalah faktor kognitif terutama kemampuan berpikir abstrak. Kohlberg (1977) menemukan bahwa tingkat perkembangan moral dipengaruhi antara lain oleh umur, ras, status sosial, tingkat intelegensi, bentuk lingkungan sosial, dan jenis kelamin. Selly Tokan (1999) meneliti pengaruh latar sosial ekonomi dan tingkat pendidikan orangtua mempengaruhi tingkat penalaran moral remaja. Budiningsih dalam penelitian berikutnya (2001), menulis sebagai berikut.

Pembelajaran moral perlu dibarengi dengan upaya-upaya untuk meningkatkan kepercayaan eksistensial, empati, dan peran sosial siswa. Untuk meningkatkan kepercayaan eksistensial, guru memfasilitasi dengan cara “kembali kepada pengalaman empiris” agar siswa lebih kritis dan matang. Diperlukan dialog antara ilmu pengetahuan empiris tentang manusia dan refleksi teologis. Dalam rangka meningkatkan empati dan peran sosial siswa, kegiatan-kegiatan seperti bermain peran dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan perlu dilaksanakan. Ini semua diperlukan, sebab moral berkembang paralel dengan empati dan peran sosial.

Dengan demikian, keadaan situasi dan lingkungan keluarga dan pergaulan teman sebaya akan mempengaruhi perilaku moral siswa, karena moral berkembang paralel dengan empati dan peran sosial. Perkembangan moral mengarah kepada terciptanya *equilibrium* yang semakin besar dalam interaksi antara remaja dan lingkungannya. Untuk membuktikan pernyataan-pernyataan di atas perlu suatu penelitian di lapangan.

Pembelajaran Moral

Kegiatan pembelajaran mengacu pada hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan siswa dalam mempelajari bahan yang disampaikan oleh Guru. Pembelajaran yang dalam hal ini berupa proses belajar mengajar (PBM) adalah kegiatan belajar siswa dalam mencapai suatu tujuan pembelajaran. Belajar dan mengajar merupakan dua konsep yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Keduanya terpadu dalam suatu kegiatan manakala terjadi interaksi antara guru dengan siswa, dan siswa dengan siswa yang lain. Interaksi antara guru dengan siswa sebagai makna utama proses pembelajaran memegang peranan penting untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan.

Tujuan pembelajaran akan tercapai juga dipengaruhi oleh metode atau cara yang digunakan. Jika metode tersebut tepat dalam penggunaan, tujuan akan semakin mudah diraih. Metode mengajar ialah cara yang dipergunakan guru dalam mengadakan hubungan dengan siswa pada saat berlangsungnya pengajaran (Nana Sudjana, 1998). Penggunaan metode yang tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran akan menjadi kendala dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Banyak bahan pelajaran yang terbuang percuma, hanya karena penggunaan metode menurut kehendak guru saja dan mengabaikan kebutuhan siswa. Efektivitas penggunaan

metode terjadi bila ada kesesuaian antara metode dengan semua komponen pembelajaran yang telah diprogramkan dalam suatu pelajaran. "Penggunaan metode yang tepat dan bervariasi akan dapat dijadikan sebagai alat dan motivasi ekstrinsik dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah (Syaiful Bahri & Aswan Zain, 1997).

Disamping metode pembelajaran, dalam pembelajaran moral digunakan model penyampaian pembelajaran moral yang agak berbeda dengan mata pelajaran lainnya. Paul Suparno, dkk. (2002) mengemukakan ada empat model penyampaian pembelajaran moral, yaitu: (1) model sebagai mata pelajaran tersendiri, (2) model terintegrasi dalam semua bidang studi, (3) model di luar pengajaran, (4) model gabungan. Masing-masing model memiliki kelebihan maupun kekuarangan. Model pembelajaran mana yang akan digunakan diperlukan komitmen bersama antara guru, pengelola sekolah serta orang tua, agar pembelajaran sesuai dengan karakteristik siswa dan kondisi sekolah. Pembelajaran moral yang dikemukakan oleh Paul Suparno tersebut, yang paling tepat berdasarkan pengamatan penulis adalah model pembelajaran terpadu (*integrated curriculum*) pendidikan moral dalam mata pelajaran. Karena sekolah tidak perlu menambah mata pelajaran baru, namun sekolah dapat mencari tema-tema tertentu kemudian diintegrasikan dalam mata pelajaran tertentu.

Kepala Pusat Kurikulum Depdiknas, Siskandar (Kompas, 10 Februari 2003) mengatakan penanaman budi pekerti dapat diterapkan pada mata pelajaran yang berkaitan dengan interaksi sosial murid, baik dalam lingkup sekolah maupun luar sekolah. Mata pelajaran tersebut antara lain Pendidikan Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, dan tentunya tidak ketinggalan pula Pendidikan Agama. Dalam Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Agama diarahkan membentuk perilaku dasar, di antaranya ketaatan pada Tuhan Yang Maha Esa, toleransi, kedisiplinan, tanggung jawab, kasih sayang, gotong royong, sopan santun, dan kejujuran.

Pada pelajaran Kewarganegaraan, siswa – antara lain – diarahkan terbiasa berbicara dan berperilaku jujur. Siswa bisa membedakan fasilitas umum dan fasilitas pribadi, berkaitan dengan milik pribadi, milik publik dan milik negara. Pada pelajaran Bahasa Indonesia, anak didik tidak hanya ditekankan mampu

berkomunikasi, tetapi juga berpikir dan bernalar dengan wawasan luas. Dengan demikian kepekaan perasaan siswa dapat diasah.

Dardiri, dkk. (1999) dalam penelitiannya yang berjudul *Pendidikan Moral di Sekolah Dinamika dan Perkembangan*, mengatakan:

... sekolah menanamkan pendidikan moral dengan berbagai cara. Pendidikan moral selalu terintegrasi dalam berbagai pelajaran. Pada kasus anak bermasalah, guru diminta untuk memberikan secara individual. Pendekatan persuasif lebih banyak digunakan, mengingatkan latar belakang sosial anak. Jika kasus penyimpangan "berat", Kepala Sekolah akan menangani langsung. Kemudian sekolah akan menjalin hubungan langsung dengan lingkungan dan orang tua siswa. Namun dipihak lain, perhatian guru kurang maksimal karena dalam sekolah tersebut banyak yang honorer dan berada di tempat manakala ia mengajar.

Moralitas merupakan sesuatu yang dipelajari, dalam arti bahwa untuk dapat bersikap dan berperilaku secara moral, perlu diketahui dulu ukuran tersebut baik atau buruk. Untuk mengetahui baik atau buruk tentunya perlu belajar, baik melalui pendidikan di sekolah maupun di masyarakat. Tidak ada siswa yang mengembangkan moral yang berasal dari dirinya sendiri. Nilai-nilai moral bukanlah sesuatu yang dibawa sejak lahir, melainkan sesuatu yang diperoleh dari luar (lingkungan keluarga, sekolah ataupun masyarakat).

Sebelum mereka bersikap, berperilaku moral, mereka harus mempelajari apa yang dianggap baik dan buruk, seperti dikemukakan di atas. Untuk itulah dalam pendidikan di sekolah perlu diajarkan tentang perbuatan baik, atau setidaknya ajaran moral tersebut ada secara tersirat dalam mata pelajaran-mata pelajaran di sekolah, khususnya bidang ilmu-ilmu sosial. Di samping tersirat pun guru hendaknya memberi teladan bagaimana bermoral baik itu. Manakala guru melihat siswanya berperilaku menyimpang, hendaknya guru langsung menegur dengan cara "santun" kepada siswa yang berperilaku menyimpang tersebut. Misal pada saat bicara antara guru dan siswa, siswa biasakan memakai bahasa "*Jawa Krama*", jika saat itu memang memakai bahasa Jawa. Hal-hal kecil seperti ini perlu mendapat perhatian dari guru.

Perkembangan moral merupakan proses yang perlahan-lahan, setahap demi setahap, dan tidak terjadi secara otomatis. Oleh karena itu, untuk mengajarkan perbuatan baik suatu tindakan, tidak dapat dilakukan secara paksa atau dalam waktu seketika. Mereka akan mengenal, mempelajari dan mencoba tindakan itu sesuai dengan aturannya, sehingga mereka memiliki kematangan dalam bertindak

dan akhirnya mereka tahu bahwa apa yang diperbuatnya tersebut baik ataupun buruk.

Paul Suparno dkk. (2002), penanaman nilai moral sama dengan penanaman nilai-nilai manusiawi. Dalam bahasa Lickoma sering disebut pendidikan watak. Lickoma dalam bukunya *Educating for Character*, menekankan pentingnya diperhatikan tiga unsur dalam menanamkan nilai moral supaya sungguh terjadi, yaitu unsur (1) pengertian, (2) perasaan, dan (3) tindakan moral. Ketiga unsur tersebut saling berkaitan. Ingat dalam penanaman tidak tinggal sebatas pengetahuan saja, tetapi sungguh menjadi tindakan seseorang.

Unsur *pengertian* moral adalah kesadaran moral, pengertian akan nilai, kemampuan untuk mengambil gagasan orang lain, rasionalitas moral (alasan mengapa harus melakukan tindakan itu), pengambilan keputusan berdasarkan nilai moral, dan pengertian mendalam tentang dirinya sendiri. Segi pengertian ini cukup jelas dapat dikembangkan dalam pendalaman bersama di kelas maupun dengan masukan orang lain. Inilah segi rasionalitas atau segi kognitif dari nilai moral. Dengan ini siswa dibantu untuk mengerti apa isi nilai yang digeluti dan mengapa nilai itu harus dilaksanakan (*dilakoni*) dalam hidup mereka. Dengan demikian siswa sungguh mengerti apa yang dilakukan dan sadar akan apa yang dilakukan.

Unsur *perasaan* moral meliputi suara hati (kesadaran akan perbuatan baik dan buruk), harga diri seseorang, sikap empati kepada orang lain, perasaan mencintai kebaikan, kontrol diri, tidak sombong. Perasaan moral ini sangat mempengaruhi seseorang untuk mudah berbuat baik atau sebaliknya berbuat jahat. Siswa dibantu untuk menyenangi ataupun mengiyakan nilai yang mau dilakukannya. Siswa dibantu untuk dapat merasakan bahwa nilai itu sungguh baik dan perlu dilakukan.

Unsur *tindakan* moral adalah kompetensi (kemampuan) untuk mengaplikasikan pengertian dan perasaan moral dalam tindakan konkrit. Tanpa kemauan yang kuat, walaupun tahu bahwa perbuatan itu baik, ia tidak akan melakukannya. Dalam pendidikan moral kemampuan dan kemauan untuk melaksakan nilai dalam tindakan nyata harus dimunculkan dan ditingkatkan. Contoh siswa dibiasakan bertindak baik dalam hal-hal yang kecil, karena ini awal dari tindakan-tindakan yang besar, yang kemungkinannya justru merugikan mereka sendiri. Dalam pembinaan ini siswa diminta untuk menghargai orang lain, misal pada saat teman mengajukan pertanyaan tidak diremehkan, tetapi justru didengarkan. Dilatih diskusi dengan segala perbedaannya, berlaku adil sekaligus

menganalisis ketidakadilan dalam masyarakat. Dengan kata lain, kebiasaan-kebiasaan berlaku baik harus terus-menerus dijalankan oleh siswa melalui pembinaan guru maupun teman lain.

Strategi penyampaian pendidikan moral bisa dimulai dengan menciptakan rasa tidak puas dalam diri siswa terhadap diri mereka tentang kebaikan. Siswa dihadapkan pada situasi konflik atau dilema-dilema moral yang merangsang pikiran mereka tentang keadilan. Dilema-dilema moral ciptaan Kohlberg dapat menjadi salah satu instrumen untuk ini, tetapi kasus-kasus baru juga dapat diciptakan sejauh sesuai dengan kondisi siswa. Dalam kelompok, siswa ditantang dengan beberapa dilema yang bersifat hipotesis, beberapa yang mereka alami sendiri dan beberapa dilema yang terjadi dalam masyarakat. Siswa diminta untuk mengajukan pendapat dengan dibarengi dengan argumen yang mendasari pendapatnya. Kemudian antar siswa beradu argumen dan guru dapat menjelaskan, mendukung, dan atau menyanggah. Aspek-aspek di atas secara teoritis akan mendukung perkembangan penalaran moral dan berkembang paralel dengan perkembangan moral (Kohlberg, 1980).

Keberhasilan Pendidikan Moral

Menurut Budiningsih (2001), untuk memperoleh suatu sikap moral yang tepat, studi di bidang moral dapat memberikan kontribusi yang berarti, sekalipun studi ini belum cukup menjamin terjadinya perilaku moral yang tepat. Studi tentang moral tidak bersifat teknis melainkan refleksif, yaitu suatu refleksi tentang tema-tema yang berkaitan dengan perilaku manusia. Moral banyak dikaji secara kognitif dan obyeknya langsung berkaitan dengan praktek kehidupan manusia. Penalaran moral dilakukan dengan berargumentasi, artinya berusaha menunjukkan bahwa suatu perbuatan adalah baik atau buruk dengan menunjukkan alasan-alasan rasional yang dapat dimengerti dan disetujui oleh semua orang.

Proses belajar mengajar pendidikan moral mempunyai spesifikasi yang berbeda jika dibandingkan dengan mata pelajaran yang lain. Pendidikan moral difokuskan pada afektif, yakni penghayatan siswa terhadap "moral". Berhasil tidaknya pencapaian tujuan pendidikan bergantung bagaimana proses belajar yang terjadi di suatu kelas. Tujuan pendidikan merupakan komponen pertama yang harus ditetapkan dalam pembelajaran, dan berfungsi sebagai indikator keberhasilan pembelajaran (Nana Sudjana, 1998: 30).

Keberhasilan pendidikan moral terlihat jika siswa memiliki kesadaran moral yaitu dapat menilai hal-hal yang baik dan buruk, hal-hal yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan, serta hal-hal yang etis dan tidak etis dan sekaligus siswa tersebut *melakoni* (melakukan) tindakan tersebut. Dengan demikian ada sinkronisasi antara penalaran moral dengan pelaku moral. Kohlberg (1971), ahli pendidikan moral mengatakan bahwa suatu perilaku moral dianggap memiliki nilai moral jika perilaku tersebut dilakukan secara sadar atas kemauan sendiri dan bersumber dari pemikiran atau penalaran moral yang bersifat otonom.

Penutup

Dekadensi moral pada anak remaja khususnya anak SLTP, sudah sampai tingkat yang membahayakan. Untuk itu perlu dicegah supaya tidak berkembang atau setidaknya dikurangi baik dalam hal kuantitas maupun kualitas. Salah satu cara yang dapat ditempuh yaitu dengan pembelajaran terpadu (*integrated curriculum*) pendidikan moral dalam mata pelajaran yang terkait dengan interaksi sosial, yakni mata pelajaran: Pancasila, Agama, Kewarganegaraan dan Bahasa Indonesia.

Tujuan pembelajaran akan tercapai jika ada keterpaduan antara lingkungan siswa (di rumah, pergaulan teman, dan sekolah) karena moral berkembang paralel dengan empati dan peran sosial. Di samping juga dipengaruhi oleh metode atau cara yang digunakan dan model penyampaian pembelajaran moral.

Keberhasilan pendidikan moral terlihat jika siswa memiliki kesadaran moral yaitu dapat menilai hal-hal yang baik dan buruk, hal-hal yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan, serta hal-hal yang etis dan tidak etis dan sekaligus siswa tersebut "*melakoni*" (melakukan) tindakan tersebut.

Daftar Pustaka

- Asri Budiningsih. (2001). "Penalaran Moral remaja dan Beberapa Faktor Budaya yang Berhubungan dengannya: Analisis Karakteristik Siswa SLTP dan SMU di Yogyakarta". *Disertasi*. PPs-Universitas Negeri Malang.
- Blasi, A. (1980). "Bridging Moral Cognition and Moral Action: A critical review of the literature". *Psychological Bulletin*.
- Dardiri, dkk. (1999). "Pendidikan Moral di Sekolah, Dinamika dan Perkembangan". *Laporan Penelitian*. Yogyakarta: FIP-IKIP Yogyakarta.

Harian *Kompas* 10 Februari 2003. Jakarta.

Kohlberg, L. (1971). "Moral Development and Moral Education". (G. Lesser, ed.). *Psychological and Edycational Practice*. Chicago: Scott, Foresman.

----- . (1981). *The Philosophy of Moral Development*. San Francisco: Harper & Row Publisher.

Magnis-Suseno, F. (1987). *Etika Dasar Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*. Pustaka Filsafat. Yogyakarta: Kanisius.

Nana Sudjana. (1998). *Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar*. Bandung: Sinar Baru.

Suparno, Paul. dkk. (2002). *Pendidikan Budi Pekerti di Sekolah: Suatu Tinjauan Umum*. Yogyakarta: Kanisius.

Syaiful Bahri D. dan Aswan Zain. (1997). *Strategi Belajar Mengajar*. Jakarta: Rineka Cipta.